

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif (2nd ed.)*. Gadjah Mada University Press.
- Grindle, Merilee S. (Ed.). (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Habermas, J. (1975). *Legitimation crisis* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of corruption: Wealth, power, and democracy*. Cambridge University Press.
- Klitgaard, R. (1998). *International Cooperation Against*. March, 3–6.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, how*. Whittlesey House.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Noer, Y. A., & Latief, S. (2019). *Teori & implementasi politik dan pemerintahan: Dalam sebuah catatan*. Jambi: CV. Salim Media Indonesia.
- Page, E. C. (2012). *Policy without politicians: Bureaucratic influence in comparative perspective*. Oxford University Press.
- Phuk Tjien, Alexander. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Palgrave Macmillan.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland; Or, why it's amazing that federal programs work at all*. University of California Press.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.

- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). *Can regulation work? The implementation of the 1972 California Coastal Initiative*. Plenum Press
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Stone, D. A. (2012). *Policy paradox: The art of political decision making* (3rd ed.). W.W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahputra, Azmi. (2021). *Bunga Rampai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Sah Media.
- Kaligis, O. C. (2016). *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan (Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*. Bandung: Alumni.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

JURNAL

- Abdimas, J. S., Hukum, F., & Tarumanagara, U. (2023). *No Title*. 1(3), 1251–1257.
- Agung, A., Mas, A., Putu, I. G., & Astawa, B. (2023). *Pengaruh Sifat Machiavellian , Love Of Money , Sistem Pengendalian Internal Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) Oleh Pegawai Di Lpd Se-Kabupaten Gianyar*. 14, 327–341.
- Ayumiati, A., Jalilah, J., & Ar-raniry, U. N. (2023). *Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Good University Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh*. *Internal Control System and Implementation of Good University Governance on the Quality of Financial Reports at State Islamic Religious Universities in Aceh*. 14(28), 129–140. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i1.5319>. Kata
- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). *Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang*. XV(2), 197–211.
- Khadijah, & Juniarti, I. (2025). *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM*. 19(1), 18–26.

- Klitgaard, R. (1998). *International Cooperation Against. March*, 3–6.
- Nasir, M. A., Siswoyo, M., & Permana, I. (2024). *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Brebes*. 4(8), 2410–2419. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i8.2749>
- Nurdin, M. Y. (2021). *KEBIJAKAN DELIBERATIF SEBAGAI DIMENSI-DIMENSI UTAMA*.
- Pramasha, A. R., Rahayu, N. S., & Istanina, R. (2025). *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Dewan Pertahanan Nasional*. 10(9), 7224–7236.
- Rahim, A., Safitri, N. U., Anabah, S., & Nurhikmah, W. (2023). *Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia*. 6, 5790–5794.
- Rose-ackerman, S., Luce, H. R., Science, P., Policy, P., & Foun-, G. (1999). *No Title*.
- Salman, M., Sangaji, J., Zorayya, P., & Noor, P. (2021). *Analisis Kebijakan Jakarta Smart City Menuju Masyarakat Madani*. 1, 62–75. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Sari, D. P., Nor, W., & Kadir, A. (2024). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. 4(1), 1808–1826.
- Simanjuntak, I., Rumapea, M. S., & Indonesia, U. P. (2021). *Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan)*. 1–5.
- Sumarsono, C. W., & Muchsin, S. (2022). *Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang guna merumuskan model yang tepat*. 7(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 17 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 40 Tahun 2023.